

ABSTRAK

Wiwin Karim Alamri. 2012. Otonomi sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 2 Tilamuta Kabupaten Boalemo. Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I, Prof.Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M.Pd, Pembimbing II : Besse Marhawati, S.Pd, M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan penyediaan sumber dana dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Tilamuta Kabupaten Boalemo, 2) mendeskripsikan pengalokasian dana dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Tilamuta Kabupaten Boalemo, 3) mendeskripsikan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) sumber dana dalam pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Tilamuta Kabupaten Boalemo sebagian besar berasal dari dana BOS. Sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai semua kegiatan operasional pendidikan di sekolah. 2) Pengalokasian pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Tilamuta Kabupaten Boalemo difokuskan pada tiga hal pokok yaitu a) alokasi dana peningkatan mutu siswa. Alokasi dana untuk peningkatan mutu siswa digunakan membiayai peningkatan kecakapan siswa baik secara akademik maupun non akademik termasuk biaya lomba dan kegiatan ekstrakurikuler, b) alokasi dana peningkatan mutu guru, dilakukan dengan mengikutsertakan guru dalam kegiatan pelatihan, seminar dan diskusi ilmiah sehingga kemampuan guru mengalami peningkatan yang sangat signifikan, c) alokasi dana pemeliharaan sekolah, anggaran ini digunakan untuk perawatan ringan, pengecatan sekolah dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, 3) Pertanggungjawaban penggunaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Tilamuta Kabupaten Boalemo dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dana serta dipajang sebagai bentuk transparansi dalam penggunaan pembiayaan pendidikan. Laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap berbagai hal yang masih perlu dibenahi serta melakukan perbaikan system pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.